

DIBALIK KURIKULUM MERDEKA: KONSEP INTEGRASI PENDIDIKAN HUMANIS BERBASIS TEKNOLOGI

**Rivana Nur Hamidah¹, Hikmah Nur Sidik², Ratminingsih³, AL Lu'lu 'Ul Maknun³,
Muhammad Muhibullah³, Musyarifah¹, Mayzihani¹**

¹Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

³Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi (FKIST) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹ 19106010036@uin-suka.ac.id

Abstrak

Potret Pendidikan di Indonesia menjadi sebuah hal yang unik dan riskan untuk dikritisi. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum yang dilazimkan menjadi sebuah budaya, bahwa ketika pemimpin berganti kebijakan kurikulum pendidikan pasti turut berganti. Ketidakkonsistenan dengan labelisasi perbaikan mutu pendidikan menjadi tameng untuk menutupi kurangnya analisis pemerintah dalam memahami serta mengejawantahkan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya terkait sistem pendidikan, tetapi arus globalisasi juga berdampak dalam berubahnya budaya pendidikan di Indonesia, kondisi ini diperburuk dengan wabah Covid-19 yang lama beredar. Problematika-problematika pendidikan yang sangat kompleks yang tidak dapat disamaratakan kondisinya di setiap wilayah yang berbeda, sehingga memerlukan kajian yang lebih dalam, agar pendidikan Indonesia tidak sebatas proses transfer ilmu yang minus implementasi. Perlu dipahaminya psikologi pendidikan oleh para tenaga pendidik, juga perlu dibudayakannya kembali makna pendidikan seperti yang disampaikan pun diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga, dari pendidikan itu sendiri mampu muncul ilmuwan-ilmuwan, maupun ahli-ahli yang memiliki adab serta menjunjung kejujuran dan sikap anti korupsi, demi pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang lebih baik. Melalui studi lapangan, penulis ingin melakukan kajian secara lebih mendalam terkait pendidikan di Indonesia, agar mampu dirumuskan jalan keluar terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan tidak meninggalkan kearifan lokal masyarakatnya, dan tetap melibatkan teknologi didalamnya.

Kata kunci: *pendidikan, kurikulum, humanis, teknologi*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan amanat Undang-Undang yang wajib ditunaikan dan diberikan kepada anak bangsa. Bangsa yang unggul tidak sekadar tertang ekonomi yang maju, tersedianya peralatan atau teknologi yang canggih, dan masifnya pembangunan. Bidang-bidang kenegaraan yang kompleks memerlukan orang-orang yang kompeten untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Bidang pendidikan sendiri juga berperan besar dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa. Tidak ada jalur lain untuk melampaui bidang-bidang lainnya tanpa melalui proses pendidikan. Bahkan ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun memerintahkan untuk membaca, makna besarnya bahwa kehidupan dunia yang sangat kompleks ini perlu ilmu untuk menguasainya. Pada bidang pendidikan itu sendiri, banyak permasalahan yang kompleks, mulai dari peraturan atau kebijakan yang berbeda-beda setiap periodenya. Sudah menjadi rahasia umum, ketika pimpinan berganti maka kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia juga turut berganti. Ketidakstabilan kebijakan memberikan dampak yang cukup signifikan ditataran paling bawah. Perubahan zaman memang syarat akan improvisasi, namun perubahan kebijakan akan turut berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Banyak sekali opini-opini liar di luaran yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan orang abad 19 sangat jauh dengan kualitas pendidikan di abad 20 bahkan di abad 21. Penurunan kualitas tersebut diiringi majunya teknologi, menjadi sebuah kondisi yang kontradiksi, dimana idealnya globalisasi teknologi sejatinya mendukung majunya pendidikan ketika diimplementasikan dengan tepat. Ketimpangan pendidikan di Jawa dan Luar Jawa juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, perbedaan kesediaan informasi, fasilitas, dan sarana prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik menjadi beberapa faktornya. Perbedaan kondisi anak-anak juga perbedaan budaya memperlengkap faktor pendidikan Indonesia masih nomor 12 di Asia. Permasalahan lainnya berupa perbedaan kecerdasan kognitif dan pola pengajaran yang kurang humanis, dimana dalam psikologi pendidikan aspek ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik.

Penelitian yang kami lakukan dalam penulisan artikel ini ingin memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia utamanya di luar Pulau Jawa. Penelitian ini relevan apabila menggunakan interpretasi hermeneutis dalam perspektif fenomenologi. Secara etimologis, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* memiliki arti tampak, *panen* memiliki arti memperlihatkan, dan *logos* memiliki arti kata; ucapan; rasio; pertimbangan. Menurut Heidegger (Moustakas, 1994) istilah fenomena, yang juga dibentuk dari istilah *phaino*, berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang benderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak di balik kita dalam cahaya. Menurut (Bagus, 2002) fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Sedangkan (Littlejohn, 2003) berpendapat bahwa fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, Brouwer (1984), fenomenologi bukanlah suatu ilmu melainkan suatu metode pemikiran, dalam fenomenologi tidak terdapat teori, tidak ada

hipotesis, tidak ada sistem di dalamnya, karena semuanya bersifat deskriptif.

Sedangkan hermeneutik dibedakan menjadi dua hal yaitu hermeneutika intensionalisme dan hermeneutika gadamerian. Pokok pikiran hermeneutika intensional adalah bahwa makna merupakan maksud atau intensi produsernya, dengan makna kata sesungguhnya telah ada dibalik kata itu sendiri. Kemudian, hermeneutika gadamerian meletakkan makna bukan pada intensi produsernya namun kepada pembacanya itu sendiri. Hermeneutika secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani *hermeneuein* yang memiliki arti menafsirkan atau menginterpretasi dan kata *hermenia* berarti penafsiran atau interpretasi. (Palmer, 2005) menyimpulkan enam definisi hermeneutika, keenam definisi tersebut merupakan urutan fase sejarah yang menunjuk suatu peristiwa atau pendekatan penting dalam persoalan interpretasi yang berkaitan dengan hermeneutika. Harapannya, dengan pendekatan ini terdapat jalan keluar untuk merumuskan kurikulum yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki setiap wilayahnya.

METODE

Metode dalam penulisan artikel ini yaitu berupa penelitian studi lapangan. Studi lapangan karena penulis melakukan kegiatan pengabdian secara langsung melalui program KKN Luar Jawa di SDN 13 Tambun Sukkean, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan interpretasi hermeneutis dalam perspektif filsafat fenomenologi, karena penulis terlibat aktif dan berbaaur secara langsung dengan objek penelitian. Titik tolak penelitian ini adalah pada aspek fenomena manusia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan warisan Ki Hajar Dewantara dari sisi pengaplikasian proses belajar mengajar antara murid dengan tenaga pendidik di Indonesia. Pemilihan aspek ini digunakan untuk meminimalisir penelitian keluar jalur dari tema yang telah diangkat, sekaligus memudahkan peneliti dalam mengambil data di lapangan. Oleh karena itu, instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Instrumen yang dirancang bertujuan untuk memvalidasi hasil observasi dan studi literatur. Validasi data-data dalam literatur-literatur yang dimiliki melalui informasi-informasi yang diutarakan oleh pihak yang diwawancarai, sesuai dengan instrumen yang telah dijadikan pedoman oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini relevan apabila menggunakan interpretasi hermeneutis dalam perspektif fenomenologi.

HASIL DAN DISKUSI

1. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan salah satu alat atau *tools* yang sangat penting dan berpengaruh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Ali Sudin (2014) terdapat tiga konsep terkait teori kurikulum, yaitu antara lain: (1). Kurikulum sebagai substansi, (2). Kurikulum sebagai sistem, dan (3). Kurikulum sebagai bidang studi. Menurutnya, kurikulum sebagai substansi memiliki makna bahwa kurikulum sebagai suatu pembelajaran di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum

sebagai sistem bermakna kurikulum menjadi sebuah bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem daripada masyarakat. Sedangkan kurikulum sebagai suatu bidang studi memiliki arti bahwa kurikulum bagian studi para ahli untuk merumuskan kurikulum yang relevan untuk diterapkan dalam sebuah sistem pendidikan.

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani "*kurir*" yang berarti pelari dan "*curere*" yang berarti tempat berpacu. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2. Kurikulum Merdeka Belajar

Indonesia menjadi salah satu negara yang terhitung sering berganti-ganti kurikulum, hal tersebut dipengaruhi adanya pergantian menteri pendidikan, dimana setiap menteri merumuskan sendiri kurikulum yang berlaku untuk sistem pendidikan yang sesuai dengan pandangan pribadi, dengan perspektif dan klaim kurikulum yang dibawa cukup relevan untuk diterapkan di pendidikan Indonesia. Saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum merdeka, yang diinisiasi oleh Bapak Nadiem Makarim.

Program Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pak Menteri sebagai jalan untuk meraih tujuan yaitu menyiapkan generasi yang siap bekerja. Menurut Junaid et al (2020) keahlian yang harus dimiliki untuk menyongsong era *big data* menstimulasi pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang harus memiliki keterampilan digital dan berpikir kreatif. Pokok-pokok kebijakan daripada kurikulum merdeka belajar antara lain: (1). Pembukaan program studi baru (2). Sistem akreditasi perguruan tinggi (3). Perguruan tinggi badan hukum (4). Hak belajar tiga semester di luar program studi. Selain dilatarbelakangi oleh pesatnya globalisasi, menurut (Sumarsih, 2022) karakteristik peserta didik yang berbeda-beda menjadikan kurikulum ini diberlakukan, dengan harapan tenaga pendidik mampu merumuskan rancangan pembelajaran serta asesmen yang menyesuaikan karakteristik daripada peserta didik. Karakteristik utama daripada kurikulum ini antara lain: (1) pembelajaran berbasis proyek atau pengembangan *soft skill* dan karakter sesuai profil pelajar pancasila (2) fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi (3) Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

3. Struktur Kurikulum Pendidikan

Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dibagi menjadi dua kegiatan utama yaitu (1) pendidikan intrakurikuler (2) proyek penguatan profil pelajar pancasila. Berdasarkan keputusan menteri, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian masing-masing pembelajaran, dimana terdapat beban belajar yang diwajibkan oleh pemerintah. Selain itu, setiap satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk melakukan improvisasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik

yaitu melakukan integrasi pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, melakukan integrasi ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar pancasila, dan mengembangkan mata pelajaran yang *independen* atau berdiri sendiri (Kemdikbud, 2022).

Sisi positif dari diberlakukannya kurikulum merdeka belajar yaitu partisipasi siswa atau mahasiswa lebih besar dan mereka lebih memiliki otonomi untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi diri. Dalam kerangka kurikulum ini partisipasi siswa lebih mendominasi daripada sesi pemaparan dari guru, selain mendapat ilmu siswa atau mahasiswa dibekali dan dilatih skil atau keterampilan. Sedangkan sisi negatif dari kurikulum ini adalah tidak adanya simulasi atau proyek sekolah percontohan untuk menerapkan kurikulum ini dan apakah aplikatif jika diberlakukan sebagai kurikulum nasional, dimana kondisi dan sarana prasarana fasilitas pembelajaran yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.

4. Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari pendidikan-pendidikan di luar negeri. Menurut survei *Political and economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia masih berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di ASIA, satu tingkat tepat di bawah negara Vietnam. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain karena:

a. Kurangnya efektifitas pendidikan di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan sesuai yang diinginkan. Paradigma yang menyebar luas di masyarakat yaitu bahwa pendidikan hanyalah sebuah proses formal untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar, dan melamar pekerjaan. Sehingga esensi dari pendidikan itu sendiri tergeser oleh kemauan industri yang mengontrol *mindset* anak-anak muda di Indonesia (Keiva, 2018).

b. Kurangnya efisiensi pengajaran di Indonesia

Menurut KBBI, efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu. Efisiensi pengajaran di Indonesia meliputi beberapa faktor yang menjadikan sebagai suatu masalah, antara lain mahal biaya pendidikan di Indonesia, *overtime* dalam waktu belajar disekolah, mutu pengajar yang tidak sama, serta kualitas pengajaran yang berbeda-beda. Selama ini, peserta didik menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar di dalam kelas, menyimak penjelasan dari guru, dan terbatas untuk mengeksplorasi serta mengembangkan minat dan bakat yang tumbuh di dalam dirinya. Proses belajar di Indonesia yang tidak efisien, menimbulkan perumpamaan bahwa pendidikan di Indonesia sebatas mementingkan profil lulusan, tanpa adanya apresiasi terhadap proses belajar yang dilakukan oleh setiap peserta didik.

c. Standarisasi pendidikan di Indonesia

Pendidikan bukan suatu hal yang statis, melainkan suatu yang dinamis. Perkembangan zaman berelasi linear dengan pendidikan, saat zaman berubah teknologi semakin canggih, maka kompetensi yang dimiliki peserta didik harus menyesuaikan zaman. Saat pendidikan di abad 19

masih dalam kategori pendidikan konvensional maka pendidikan di abad 20 sudah terdapat campur tangan teknologi di dalamnya. Sehingga diperlukan minimal kompetensi yang setidaknya dikuasai oleh peserta didik agar mampu bersaing dengan dunia global.

d. Rendahnya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di Indonesia

Ketimpangan fasilitas pendidikan dan sarana prasarana yang mendukung kelancaran proses pembelajaran nyata terjadi di Indonesia. Banyak perspektif bahwa sarana prasarana pendidikan di Jawa jauh lebih lengkap daripada di Luar Jawa, memang benar, tetapi tidak dapat dipungkiri di internal Pulau Jawa tentu masih terdapat ketimpangan perlengkapan fasilitas pendidikan. Sehingga perlu adanya pemerataan penyediaan fasilitas dan pengkondisian sarana prasarana pendidikan yang memadai.

e. Rendahnya kualitas kompetensi guru

Menurut Pangestika (2015) guru merupakan ujung tombak yang menentukan kualitas pendidikan di Indonesia karena guru adalah faktor yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik saat melakukan aktivitas belajar-mengajar di ruang kelas. Berdasarkan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10, menentukan bahwa macam-macam kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Saat ini di Indonesia sudah terdapat program PPG (Pendidikan Profesi Guru), yaitu sebuah program rintisan kemendikbud untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai Standar Pendidikan Guru. Melalui program ini guru di era revolusi industri 4.0 didukung agar memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan *critical thinking* dan *problem solving*, *communication and collaborative skill*, *creativity and innovative skill*, *information communication technology literacy*, *contextual learning skill*, serta *information and media literacy*. Sehingga memang sudah selayaknya guru memiliki kompetensi yang terstandarisasi agar kualitas pendidikan baik yang di Jawa maupun di Luar Jawa bisa diintegrasikan secara bersamaan (Alfarisa, 2015).

5. Potret Pendidikan di Indonesia



Figure 1. Ruang kelas SDN 13 Tambun Sukkean

Gambar di atas adalah salah satu potret pendidikan di luar Jawa, yakni di SDN 13 Tambun Sukkean, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini berada di pesisir Danau Toba yang merupakan sekolah terdekat bagi beberapa desa di sekitarnya. Sekolah ini sempat ditutup selama dua tahun dan baru menerima siswa serta memulai proses pembelajaran di semester ganjil tahun 2022. Sarana dan prasarana di sekolah ini masih sangat terbatas, fasilitas pendukung pembelajaran juga masih terbatas jumlahnya. Kondisi ruang kelas yang belum memenuhi standar minimal, seperti tidak layaknya meja dan bangku tempat belajar, jumlah spidol dan kapur yang terbatas, serta ventilasi udara yang kurang bagus. Selain itu, kondisi toilet masih sangat jauh dari kata layak, pun belum adanya tempat cuci tangan di sisi-sisi sekolah tersebut.

Proses pembelajaran yang dilakukan masih sekadar jalan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: baru dibukanya kembali sekolah, keterbatasan guru dalam memahami kurikulum merdeka belajar sebagai akibat belum diselenggarakannya *training* atau pembekalan dari dinas terkait, serta tertinggalnya kualitas pemahaman peserta didik dalam menangkap materi. Pembelajaran belum terstruktur dengan baik dan belum dimaksimalkannya pembelajaran di luar kelas, sehingga KBM dilaksanakan secara monoton. Meskipun demikian, semangat peserta didik tinggi untuk belajar, mereka rela menempuh jarak jauh untuk ke sekolah meskipun dengan jalan kaki.

6. Pendidikan dalam perspektif Ibnu Khaldun

Membedah mukaddimah Ibnu Khaldun, di dalamnya terdapat banyak sekali pembelajaran, bahkan bisa dikatakan setiap kata yang disusun merupakan suatu kebijaksanaan atas umat muslim yang bertebaran. Sejarah merupakan bukit emas yang mana ketika kita memahami betul-betul dan mengimplementasikan pemikiran kita dengan cermat dan cerdas akan memudahkan kita untuk selangkah lebih dekat dengan peradaban yang maju.

Pasal 6 dari muqaddimah Ibnu Khaldun membahas mengenai ilmu dan pendidikan. Ilmu dan pendidikan adalah adab dalam diri manusia, dimana keduanya berperan sebagai gejala final yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya di dalam masyarakat. Ibnu Khaldun rahimahullah mengemukakan bahwa pertumbuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh peradaban. Negara Qairawan dan Cordova adalah contoh dua pusat kebudayaan Maghribi dan Andalusia pada masa itu, yang berkembang pesat pun terdapat pasar-pasar yang hidup dan lautan yang luas bagi bermacam ilmu pengetahuan dan keahlian.

Terdapat enam tujuan pendidikan menurut perspektif Ibnu Khaldun yaitu sebagai berikut (1) menyediakan pendidikan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman dengan tidak meninggalkan potensi-potensi yang lainnya (2) menyiapkan generasi yang berakhlak (3) menyiapkan bekal kemasyarakatan dan sikap sosial (4) menyiapkan generasi dari segi pekerjaan (5) menyiapkan generasi dari segi pemikiran (6) menyiapkan generasi dari sisi kesenian yang menunjang kreativitas

(Nahrowi, 2018). Konsep yang ditawarkan dan dirumuskan oleh Ibnu Khaldun sangat relevan dengan apa yang sedang diaplikasikan di Indonesia. Pendidikan yang tidak sebatas menghafal ilmu, namun juga mengembangkan potensi diri serta menyiapkan keterampilan untuk bekerja di masa mendatang.

7. Menuju pendidikan Indonesia yang humanis

Pendidikan humanis bermakna melalui lembaga ini tidak sekadar terjadi proses *transfer of knowledge* tetapi menjadikannya sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh kreativitas dan kepribadian, serta potensi peserta didik. Proses standarisasi kompetensi peserta didik melalui indikator capaian yang harus diraih peserta didik merupakan suatu hal yang tidak humanis. Maknanya, masih ada penyamarataan secara nasional bahwa standar pintar adalah nilai 100 yang ditolak ukuran pada pelajaran matematika, standar pintar terlihat dari nilai rapor yang tidak ada merahnya, dan lain sebagainya. Sisi humanis pendidikan adalah dimana ditumbuhkan paradigma bahwa setiap peserta didik memiliki *passion* dan kelebihan di bidang masing-masing, yang mana perlu didukung dan digiring agar mampu menjadi ahli di bidang yang digeluti.

Normalisasi dan standarisasi menjadi akar budaya munculnya paradigma bahwa kesuksesan berbanding lurus dengan bagusnya nilai rapor dan berlaku kebalikannya. Sehingga, pendidikan hanyalah sebatas ajang mendapatkan ijazah kelulusan agar bisa naik jenjang berikutnya, sampai garis finish mendapatkan gelar sarjana, lalu bekerja. Hal-hal itu yang membudaya di Indonesia yang menjadikan luntarnya bahkan hilangnya esensi daripada dirumuskannya pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara.

Salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang sangat menarik yaitu pancadarma yang merupakan ciri dari Tamansiswa. Pancadarma terdiri dari asas kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan (Istiqfaroh, 2020). Asas kemerdekaan berarti mendidik peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan pada pikirannya, batinnya, dan tenaganya, yang mana peserta didik memiliki kebebasan yang bertanggung jawab serta diharapkan tumbuh kemampuan inisiatif dan kreatif pada peserta didik. Selain pancadarma, juga ada sistem among yang merupakan ciri khas sistem pendidikan Tamansiswa. Sistem among memberikan kebebasan pada peserta didik untuk bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri, namun tetap ada pengawasan dari pamong (pendidik) yang memiliki peran sebagai fasilitator, pamong (pendidik) akan bertindak, bila perlu dengan paksaan jika kemauannya berpotensi membahayakan keselamatannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik terdiri dari orang tua, guru, atau pemimpin, peran pendidik yaitu sebagai fasilitator dan motivator.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Hal ini bermakna bahwa pendidikan sejatinya secara penuh mendukung segala potensi yang ada dalam diri peserta didik secara kodrat alamiahnya, mereka sebagai manusia dan sebagai bagian masyarakat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya (Dewantara, 2009). Sehingga pendidikan humanis perlu dibudayakan kembali agar sekolah tidak sekadar menjadi formalitas dan rutinitas yang membosankan serta kaku.

8. Integrasi pendidikan humanis dan teknologi

Pendidikan di abad 21 mengkondisikan pendidikan itu sendiri dengan teknologi sebagai instrumen dalam pendidikan itu sendiri. Menjadi sebuah tantangan tersendiri, dimana perpaduan yang tidak seimbang atas kolaborasi pendidikan dengan teknologi akan berakibat pada terkikisnya nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Pergeseran akibat peran teknologi yang menuntut manusia menjadi kreatif, terampil, profesional, dan banyak modal. Munculnya *start up start up* secara tidak langsung menyebabkan pelajar Indonesia menginginkan sesuatu hal yang dapat diraih dengan mudah dan instan. Mereka berbondong-bondong mempelajari bagaimana mengkode dan lain sebagainya. Bukan menjadi suatu kesalahan tetapi cukup signifikan dalam menggeser budaya keilmuan yang diinginkan oleh pendidikan itu sendiri. Belajar bukan menjadi suatu hal karena ingin mendalami keilmuan itu sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar saat ini. Pengaburan daripada paradigma pendidikan yang memanusiakan manusia bergeser akibat fenomena *genetic manipulation*, *cybernetic organism*, *automation*, dan *robotics* (Dewi, 2019).

Transformasi *human being* menjadi *techno being* menyebabkan pendidikan di Indonesia mengalami sindrom teknosentrisme, yaitu perasaan atau sifat ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Hal inilah yang memicu insiden dehumanisasi berupa transformasi kemerosotan tata nilai seperti kebenaran, kebaikan, keindahan (estetika) dan kesucian berangsur-angsur digantikan dengan sumber daya manusia yang hanya peka dan menghargai nilai-nilai dasar, seperti materi (kepemilikan kekayaan), hedonisme (kenikmatan jasmani), dan gengsi (prestise) (Dewi, 2019).

Kompleksitas antara zaman, globalisasi teknologi, dan pendidikan itu sendiri perlu dikaji secara mendalam agar mampu menciptakan formula yang menjawab semua perubahan zaman dengan tidak meninggalkan esensi dari setiap bidangnya. Kurikulum merdeka yang terorientasi teknologi untuk menciptakan profil lulusan yang profesional, kreatif, dan siap kerja perlu dievaluasi. Faktor penyebabnya yaitu manfaat teknologi belum menjamah seluruh kalangan akademisi di wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah 3T. Integrasi antara teknologi dengan nilai pendidikan harus menciptakan grafik yang linear, tidak meninggalkan satu sama lain. Sehingga dengan proporsi yang tepat antara teknologi dan pendidikan kualitas pendidikan yang bagus bukanlah menjadi angan-angan belaka. Selain itu proses *dehumanisme* perlu ditanamkan, agar orientasi sekolah menjadi tempat yang paling dirindukan, bukan menjadi tempat yang menakutkan akibat rutinitas dan formalitas yang menstandarisasi manusia seperti mesin produksi.

DAFTAR PUSTAKA (10.5 pt)

9. Akip, Muhammad dkk. (2022). Konsep Merdeka Belajar Perspektif Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Tazkirah: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 2.
10. Aziz Q., Ikhwan dkk. (2018). Konsep Pendidikan dalam Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan

Pendidikan di Indonesia, *Sumbula*, Vol. 3, No. 1.

11. Budiati, Nuning. Penerapan Konsep 3N (*Niteni, Nirokke, Nambahi*) dalam Pembelajaran Matematika, *Prosiding Seminar Nasional Etnomatnesia*.
12. Istiqfaroh, Nurul. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia, *Lintang Songo: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 2.
13. Sholihah, Dyah Sih Alin. (2021). Pendidikan Merdeka dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya Terhadap Merdeka Belajar di Indonesia, *Literasi*, Vol. XII, No. 2.
14. Wardani, Kristi. (2010). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter menurut Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara, *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education*.
15. Yanuarti, Eka. (2017). Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Kurikulum 13, *Jurnal Penelitian*, Vol. 11, No. 2.
16. Sudin, A. (2014). *Kurikulum dan pembelajaran*. UPI Press.
17. Elisa, E. (2018). Pengertian, peranan, dan fungsi kurikulum. *Jurnal Curere*, 1(02).
18. Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195-205.
19. Sumarsih, I., Marliani, T., Hadiansyah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.
20. Tholani, M. I. (2013). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah Aspek Budaya). *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 64-74.
21. [PPG Dalam Jabatan - Direktorat Pendidikan Profesi Guru \(PPG\) \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) diakses pada Rabu, 23 November 2022 pukul 11.07 WIB
22. Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. In *Makalah Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 9, pp. 671-683).
23. Nahrowi, M. (2018). Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 77-90.
24. Dewantara. Ki Hadjar, Menuju Manusia Merdeka, Yogyakarta: Leutika, 2009